

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemberian persetujuan lingkungan di Kota Yogyakarta penerapannya masih menggunakan ketentuan hukum yang lama, tidak dapat dilakukan secara langsung, bahkan dengan kehadiran PP dan Permen sebagai petunjuk teknis pun tidak menjamin pelaksanaan peraturan baru UU Cipta Kerja ini dapat langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan hak otonominya masih harus menerjemahkan peraturan UU Cipta Kerja ini guna disesuaikan dengan daerahnya masing-masing, sebelum penerapan UU tersebut maka pemerintah daerah perlu membentuk Perda baru. Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri hingga saat ini belum melakukan perubahan perda dikarenakan adanya pembatasan pembentukan perda setiap tahunnya, sedangkan UU Cipta Kerja melalui sistem omnibus lawnya banyak merubah peraturan dari berbagai UU, yang tentunya banyak pula perda yang harus dirubah guna menyesuaikan peraturan baru tersebut. Dalam pelaksanaannya hingga saat ini DLH Kota Yogyakarta dalam melakukan penerbitan izin persetujuan lingkungan masih mengacu pada peraturan yang lama yaitu PP Nomor 24 tahun 2018 terkait dengan pengajuan permohonan perizinan.

## **B. Saran**

Pemerintah Kota perlu segera mengganti Peraturan Daerah tentang Persetujuan Lingkungan didasarkan pada Peraturan Pemerintah yang baru sehingga pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup melalui pemberian persetujuan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja bisa segera diwujudkan dan diterapkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Departemen Kajian Strategis, 2020, *Catatan Kritis Omnibus Law Membedah RUU Cipta Kerja*, Kabinet Eksplorasi Makna, Jatinangor.

Emil Salim, 1982, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta.

Levinson, 1964, *Role, Personality and Social Structure*, dalam Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg, *Sociological Theory, a book of Readings*, The MacMillan Company, New York.

Marion. J. Levy, Jr, 1952, *The Structure of Society*, Princeton University Press, New Jersey.

Munadjat Danusaputro, 1980, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya.

W.Riawan Tjandra , 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati. 2014, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Cetakan ke-46, Jakarta: Rajawali Pers.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1)

#### **JURNAL:**

Ani Sri Suryani, 2020, "Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan", *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol.XII. Nomor 20/Oktober/2020, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Nila Amania, 2020, "Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup", *Jurnal Studi*, Vol-VI/No.-02/November/2020, Syariarti.

#### **WEBSITE:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/peran>, diakses 20 Maret 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pemberian>, diakses 20 Maret 2021.

Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah

<http://dlh.kalteng.go.id/berita/focus-group-discussion-fgd-peraturan-pemerintah-nomor-22-tahun-2021-tentang-penyelenggaraan-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-terkait-persetujuan-lingkungan> diakses pada tanggal 10 Juni 2021

Website Resmi Kota Yogyakarta <https://www.jogjakota.go.id/pages/geografis> di akses pada tanggal 24 Februari 2021

Website Resmi Badan Pusat Statisti Kota Yogyakarta <https://jogjakota.bps.go.id/indicator/12/113/5/proyeksi-penduduk-kota-yogyakarta-menurut-kecamatan-2015-2025.html> di akses pada tanggal 24 Februari 2021

